

MEMBANGUN DESAIN DAN MODEL *ACTION RESEARCH* DALAM STUDI DAN AKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rudi Saprudin Darwis

FISIP Universitas Padjajaran Bandung
rudi.darwis@unpad.ac.id

Abstract: This paper will describe the action research as one of the alternative method of study and action research in community empowerment. Action research is based on the assumption that the research agenda should be linked with changes in society. Action research is not only to obtain the truth alone, but also to create conditions that are expected. Action research can be used effectively in the study of community empowerment and action given the characteristics of the importance of active citizen participation. Through action research it can be derived a formula according to the condition of society in its efforts to empower the community.

Keywords: action research, empowerment, participation

Abstrak: Tulisan ini akan menguraikan tentang *action research* (penelitian tindakan) sebagai salah satu alternatif metode penelitian dalam studi dan aksi pemberdayaan masyarakat. Penelitian tindakan didasarkan kepada asumsi bahwa penelitian harus dihubungkan dengan agenda perubahan dalam masyarakat. Penelitian tindakan dilakukan tidak hanya untuk memperoleh kebenaran semata namun juga menciptakan kondisi yang diharapkan. Penelitian tindakan dapat digunakan secara efektif dalam kajian maupun aksi pemberdayaan masyarakat mengingat karakteristiknya yang mementingkan partisipasi warga masyarakat secara aktif. Melalui penelitian tindakan akan dapat dihasilkan formula yang sesuai dengan kondisi masyarakat dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: penelitian tindakan, pemberdayaan, partisipasi.

PENDAHULUAN

Action Research (penelitian tindakan) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan sekaligus melakukan tindakan untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat. Penelitian

tindakan menjadi alternatif dalam melakukan penelitian yang menurut Cresswell (2010) didasarkan pada pandangan advokasi/partisipatoris yang berasumsi bahwa penelitian harus dihubungkan dengan politik dan agenda politis. Penelitian ini umumnya memiliki agenda aksi demi reformasi yang diharapkan dapat mengubah kehidupan para partisipan, institusi-institusi di mana mereka hidup dan bekerja, dan kehidupan para peneliti sendiri. Penelitian tindakan memiliki karakteristik tertentu yang memungkinkan untuk memberikan hasil yang dapat menciptakan perubahan.

Mengutip Kemmis dan Wilkinson (1998), Cresswell (2010) menyebutkan karakteristik-karakteristik inti penelitian partisipatoris:

1. Tindakan partisipatoris bersikap dialektis dan difokuskan untuk membawa perubahan;
2. Penelitian ini ditekankan untuk membantu individu-individu agar bebas dari kendala-kendala yang muncul dari media, bahasa, aturan-aturan kerja, dan relasi kekuasaan dalam ranah pendidikan;
3. Penelitian ini bersifat emansipatoris yang berarti bahwa penelitian membantu membebaskan manusia dari ketidakadilan-ketidakadilan yang dapat membatasi perkembangan dan determinasi diri;
4. Penelitian ini bersifat praktis dan kolaboratif karena ia hanya dapat sempurna jika dikolaborasikan dengan penelitian-penelitian lain, dan bukan menyempurnakan penelitian-penelitian lain.

Penelitian tindakan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menemukan upaya-upaya perubahan masyarakat baru yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Adanya prinsip partisipasi dalam penelitian tindakan menjadikan metode ini menjadi metode yang efektif untuk melakukan kajian dan upaya-upaya pengembangan masyarakat.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berkaitan dengan konsep 'power' (kekuasaan) yang menjadi kata dasarnya. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Hal ini menunjukkan secara konseptual, dalam pemberdayaan terkandung adanya upaya pemberian kekuasaan agar dia memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang dikehendaknya.

Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (dalam Suharto, 1997):

- pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995)
- Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengendalian atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (Parson, et.al., 1994)
- Pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987)
- Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rapaport, 1984)

Memperhatikan berbagai pengertian pemberdayaan dari berbagai ahli tersebut, Suharto (2006) menyimpulkan bahwa pemberdayaan dapat dipandang sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Lebih jauh lagi tampak bahwa pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan dari pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Lebih rinci, Suharto (2006) menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis yang dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: 'kekuasaan dalam' (*power within*), 'kekuasaan untuk' (*power to*), 'kekuasaan atas' (*power over*), dan 'kekuasaan dengan' (*power with*). Tabel 1 akan menunjukkan indikator keberdayaan berdasarkan aspek-aspek tersebut.

Tabel 1. Indikator Keberdayaan

| JENIS HUBUNGAN KEKUASAAN | KEMAMPUAN EKONOMI | KEMAMPUAN MENGAKSES MANFAAT KESEJAHTERAAN | KEMAMPUAN KULTURAL DAN POLITIK |
|---|--|---|---|
| <p>Kekuasaan di dalam: Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah</p> | <ul style="list-style-type: none"> • evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya • keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara • Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • keercayaan diri dan kebahagiaan • keinginan memiliki kesejahteraan yang secara • Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain • Keinginan untuk mengontrol jumlah anak. | <ul style="list-style-type: none"> • assertivenss dan otonomi • keinginan untuk menghadapi subkoordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik • Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum, dan politik |
| <p>Kekuasaan untuk: Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; Meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses</p> | <ul style="list-style-type: none"> • akses terhadap pelayanan keuangan mikro • Akses terhadap pendapatan • akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga • Akses terhadap pasar • Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak | <ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan, termasuk kemelekan hurup • Status kesehatan dan gizi • Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi • ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Mobilitas dan akses terhadap dunia diluar rumah • Pengetahuan mengenai proses hukum, politik, dan kebudayaan • kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hukum, politik, dan kebudayaan. |
| <p>Kekuasaan atas: Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro; Kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkan • Kontrola atas pendapatan aktivitas produktif keluarga dan lainnya • Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga • Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga • Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana • Aksi individu untuk mempertahankan diri dan kekerasan keluarga dan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak perempuan pada tingkat keluarga dan masyarakat • Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum, dan politik |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Kekuasaan dengan: Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern • Mampu memberi gaji kepada orang lain • Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan dsikriminasi gender pada konteks ekonomi makro | <ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga • Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis • Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat • Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hukum, pada tingkat masyarakat dan makro |
|--|---|--|--|

Sumber: Suharto (2006:65)

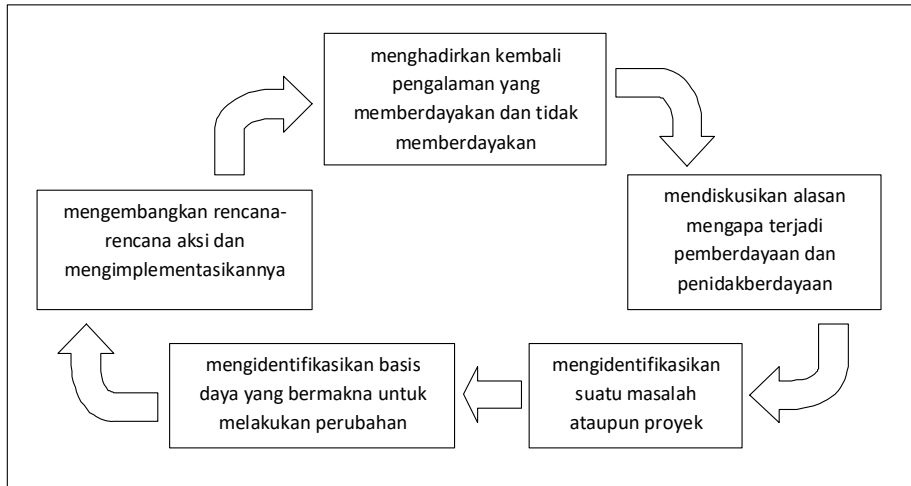
Sejalan dengan dengan uraian dari Suharto, dari sudut pandang yang lain, Adi (2013) memandang pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, di mana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya ditentukan jangka waktunya. Konsekuensinya, bila program itu selesai maka dianggap pemberdayaan sudah selesai dilakukan. Sebagai suatu proses, dalam, pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan (*on-going*) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja. Seperti halnya juga individu, dalam suatu komunitas proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu masih tetap ada dan mau berusaha meberdayakan diri mereka sendiri.

Mengutip Hogan (2000), Adi (2013:212) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu:

1. menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*);
2. mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reason for depowerment/empowerment*);

3. mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*);
4. mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*); dan
5. mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*)

Gambar 1 Siklus Pemberdayaan



Sumber: Hogan (2000, dalam Adi, 2013:213)

Siklus di atas menunjukkan proses pemberdayaan tidaklah berhenti pada suatu titik tertentu, akan tetapi lebih merupakan sebagai upaya berkesinambungan untuk meningkatkan daya yang ada. Pemberdayaan sebagai suatu program harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat masyarakat agar lebih pandai, mampu mengembangkan komunikasi antar mereka, sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada.

Dalam prosesnya tampak bahwa keterlibatan masyarakat menjadi hal yang penting dalam pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat seringkali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam praktiknya, penggunaan istilah partisipasi kadangkala belum bermakna sebagai partisipasi yang sesungguhnya (*genuine participation*). Partisipasi yang sesungguhnya menurut Mikkelsen (2005, dalam Adi, 2013) berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, ia adalah tujuan dalam suatu proses demokrasi. Dalam kaitannya

dengan pemberdayaan Mikkelsen menggunakan istilah partisipasi yang digunakan oleh Chambers (2002) dalam bentuk: “Partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan yang dimaknai sebagai proses yang memungkinkan (*enable*) masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah yang mereka inginkan”.

DESAIN DAN MODEL *ACTION RESEARCH*

Penelitian tindakan (*action research*) memiliki ciri, prinsip, pedoman, dan prosedur tertentu. Coghlan dan Brannick (2005) menyatakan bahwa penelitian tindakan merupakan suatu proses demokratis dan partisipatoris yang menyangkut pengembangan pengetahuan praktis dalam upaya mencari tujuan yang bermanfaat demi kemaslahatan kehidupan di dunia. Koshy (2005) menegaskan pula bahwa penelitian tindakan selalu berhubungan dengan tindakan untuk mencapai hasil praktis dan menciptakan bentuk pemahaman baru, karena tindakan tanpa pengetahuan adalah buta dan teori tanpa tindakan tidak berarti. Bila dibandingkan dengan metode penelitian lainnya, Yaumi dan Damapolii (2014) memandang bahwa penelitian tindakan memiliki tujuan dan prinsip dasar yang sedikit berbeda, yaitu lebih ditujukan untuk meningkatkan praktik ketimbang memproduksi pengetahuan, berfokus pada praktik sosial, bertujuan untuk peningkatan keadaan, merupakan proses siklus, diikuti dengan temuan sistematis, merupakan proses reflektif, bersifat partisipatif, dan topik atau masalahnya ditentukan oleh praktisi.

Lebih mendasar, Yaumi dan Damapolii (2014:7-8) menjelaskan sifat penelitian tindakan berdasarkan paradigmanya yang berbeda dari jenis penelitian lainnya. Penelitian tindakan mengikuti ontologi objektif yang berpandangan bahwa objek penelaahan sebagai realitas sosial dan alamiah mempunyai eksistensi independen dari kognisi manusia, serta mengikuti epistemologi subjektif yang menyatakan bahwa penyelidikan inderawi adalah sarat nilai. Penelitian tindakan berkonsentrasi pada reflektivitas epistemik yang melihat pada minat dan emansipasi melalui reflektivitas diri. Reflektivitas bukanlah suatu proses yang netral dan dikondisikan secara sosial dan historis. Pengetahuan reflektif harus diarahkan pada pernyataan normatif dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Seperti mengutip pernyataan

Reason dan Bradbury (2001) bahwa hal tersebut sesuai dengan visi mengenai apa yang seharusnya, apa yang benar dan salah, serta muncul melalui proses membangun kesadaran.

Penelitian tindakan difokuskan pada hadirnya pengetahuan melalui tindakan. Pengetahuan yang dikembangkan melalui penelitian tindakan adalah situasional, tertentu, dan tidak praksis. Dalam penelitian tindakan, data dipadukan dan diinterpretasikan secara kontekstual. Dasar validasi penelitian tindakan adalah perlakuan secara sengaja melalui siklus yang terintegrasi ke dalam setting penelitian. Mengutip Reason dan Torbert (2001), dasar pelaksanaan penelitian tindakan bersandar pada asumsi epistemologis yang menyatakan bahwa tujuan penelitian dan wacana akademik bukan hanya untuk mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan keadaan dunia, melainkan bagaimana mengubahnya. Penekanannya bukan hanya sekadar menghasilkan pengetahuan dan menggunakan metodologi untuk mengumpulkan data, melainkan juga siapa yang memutuskan agenda penelitian dan siapa yang mendapatkan keuntungan dari hasil penelitian itu.

Ditinjau dari berbagai perspektif, penelitian tindakan terdiri dari beberapa jenis. Menurut Yaumi dan Damapoli (2014) setidaknya penelitian tindakan dapat ditinjau dari perspektif objek atau luas kawasannya, dari perspektif pelaksanaannya, dan dari perspektif pengumpulan datanya. Bila memperhatikan kategorisasi tersebut, penelitian tindakan yang dilakukan dalam konteks pemberdayaan masyarakat termasuk ke dalam kategori penelitian tindakan berdasarkan pelaksanaannya, yaitu termasuk jenis penelitian tindakan partisipatori. Penelitian tindakan partisipatori adalah suatu bentuk penelitian yang berorientasi pada masalah sosial di masyarakat dengan penekanan pada penelitian yang berkontribusi pada emansipasi untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Menurut Stringer (1996) tujuan penelitian tindakan partisipatori adalah untuk memperbaiki kualitas organisasi, masyarakat, dan kehidupan suatu anggota keluarga.

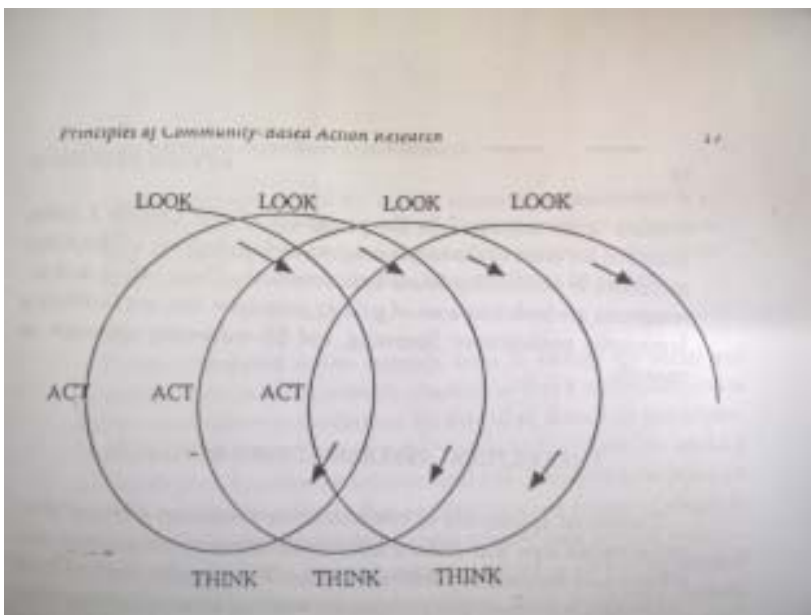
Salah satu model penelitian tindakan partisipatori adalah model penelitian yang dirumuskan oleh Ernest T. Stringer (1996) sebagai penelitian tindakan berbasis komunitas. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kolaboratif untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna melakukan tindakan yang sistematis untuk mengatasi masalah masalah tertentu. Model Stringer memiliki kerangka dasar yang kuat yang ditandai dengan langkah: *look* (melihat), *think* (berpikir), dan *act* (bertindak).

Look (melihat) meliputi aktivitas mengumpulkan informasi yang relevan (pengumpulan data), menggambarkan situasi (mendefinisikan dan mendeskripsikan);

Think (berpikir) meliputi kegiatan mengeksplorasi dan menganalisis: apa yang sedang terjadi (analisis), menginterpretasi dan menjelaskan atau berteori;

Act (bertindak) meliputi kegiatan merencanakan (melaporkan), mengimplementasikan, dan mengevaluasi.

Model Stringer memperlihatkan model spiral interaktif yang merupakan kombinasi dari proses *look*, *think*, dan *act*. Proses ini merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus sampai ditemukan pencapaian hasil yang diinginkan. Jika target yang hendak dicapai belum menunjukkan hasil yang memadai, maka dapat diulangi hingga beberapa kali sehingga perbaikan dapat dilakukan sesuai dengan standar yang ditentukan. Model spiral interaktif itu sebagai berikut:



Gambar 2 Model Spiral Penelitian Tindakan (Sumber: Stringer (1996))

Untuk mengimplementasikan Model Stringer ini ada beberapa prinsip kerja Penelitian Tindakan Berbasis Komunitas, yaitu:

1. Bentuk hubungan dalam penelitian tindakan harus:

- meningkatkan perasaan setara untuk semua orang yang terlibat
 - memelihara keserasian
 - Sedapat mungkin menghindari konflik
 - Menanggulangi konflik yang terjadi
 - Menerima orang apa adanya
 - Meningkatkan kemampuan orang dalam menjalin hubungan
 - Peka terhadap perasaan orang lain
2. Berkomunikasi secara efektif, yaitu:
- Mendengarkan dengan penuh perhatian
 - menerima dan bertindak sebagaimana yang diharapkan
 - dapat memahami setiap orang
 - Jujur
 - Bertindak sesuai dengan sosial budaya yang dibutuhkan
 - Menyarankan orang lain secara berkala
3. Partisipasi efektif ketika
- Terlibat se-aktif mungkin
 - memberikan kemungkinan orang lain untuk menunjukkan dirinya
 - memberikan dukungan kepada orang lain
 - meningkatkan rencana dan kegiatan yang memungkinkan orang untuk terlibat
 - Berdamai dengan keberibadian orang lain
4. Adanya inklusi dalam penelitian tindakan
- memaksimalkan keterlibatan semua individu yang relevan
 - pelibatan semua kelompok yang terkena pengaruh
 - pelibatan semua isue yang relevan
 - memastikan kerjasama antar semua komponen
 - memastikan semua kelompok yang relevan memperoleh keuntungan

PENUTUP

Dalam melakukan kajian dan aksi pemberdayaan masyarakat, hal yang paling harus diperhatikan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses benar-benar partisipatif. Masyarakat tidak sekadar menjadi sumber data tapi tidak juga menjadi pengambil keputusan dalam proses.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Pres
- Coghlan, David & Brannick, Teresa. (2005). *Doing Action Research in Your Own Organization*, 2nd edition. London : Sage Publication Ltd.
- Koshy, Valsa. (2005). *Action Research for Improving Practice: A Practical Guide*. London : Sage Publication Ltd.
- McNiff, Jean & Whitehead, Jack. (2002). *Action Research: Principles and Practice*. London : RoutledgeFalmer.
- Stringer, Ernest T. (1996). *Action Research: A Handbook for Practitioners*. Los Angeles : Sage Publication, Inc.
- Suharto, Edi. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS.
- _____. (2013). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Yaumi, M. & Damopolil, M. (2014). *Action Research: Teori, Model, & Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Lampiran:

Contoh Format Penulisan Laporan Penelitian Tindakan¹

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Fokus Penelitian
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Konsep-konsep Penelitian Tindakan Yang Relevan
- B. Konsep Model Tindakan
- C. Penelitian Yang Relevan
- D. Kerangka Teoretis

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Metode Penelitian**
- B. Prosedur Penelitian Tindakan**
- C. Kriteria Keberhasilan Tindakan**
- D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**
- E. Pengolahan dan Analisis Data**
- F. Lokasi dan Waktu Penelitian**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian**
- B. Pembahasan**

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan**
- B. Saran**

¹ Diolah dari Yaumi, M. & Damopolil, M. 2014.
Action Research: Teori, Model, & Aplikasi.
Jakarta: Penerbit Kencana. Hal 155-158.